



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NOMOR : 555 TAHUN 2019

**TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu menambah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
- b. bahwa untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil dimaksud dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2019.

- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Keuangan Nomor: S.1017/MK.02/2018 tanggal 21 Desember 2018;
 2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K26-30/V15-8/93 tanggal 31 Januari 2019;
 3. Surat Bupati Pandeglang Nomor: 800/1676/BKD/2019 tanggal 13 Juni 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2019.

PERTAMA : Penetapan Rincian Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pandeglang sejumlah **54** (lima puluh empat) sebagaimana terlampir;

KEDUA : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Pandeglang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kabupaten Pandeglang;


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Pandeglang untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 27 September 2019

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi**

The image shows a circular official stamp of the Ministry of State Apparatus Management and Bureaucratic Reform. The stamp contains the text 'MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI' and 'REPUBLIK INDONESIA'. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name 'Syafuruddin' is printed in bold black text.

Syafuruddin

Tembusan :

1. Menteri Keuangan Up. Dirjen Anggaran;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Lampiran
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Nomor : 555 Tahun 2019
Tanggal : 27 September 2019

**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. PANDEGLANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4		5
JUMLAH SELURUHNYA			54		
I.TENAGA PENDIDIKAN			0		
II.TENAGA KESEHATAN			0		
III.TENAGA TEKNIS			54		
1	ANALIS ANGKUTAN LAUT	S-1 KELAUTAN / D-IV KELAUTAN	1	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS PERHUBUNGAN , BIDANG ANGKUTAN , SEKSI ANGKUTAN LAUT ✓
2	ANALIS BARANG MILIK NEGARA	S-1/D-IV MANAJEMEN	1	1	SEKRETARIS DAERAH , BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH , BIDANG BARANG MILIK DAERAH , SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH ✓
3	ANALIS BENIH	S-1 ILMU PERIKANAN / D-IV ILMU PERIKANAN	1	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS PERIKANAN , BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA , SEKSI PEMBENIHAN IKAN ✓
4	ANALIS INFRASTRUKTUR	S-1 TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNIK SIPIL	1	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG PROGRAM , SEKSI PERENCANAAN DAN PROGRAM ✓

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4		5
5	ANALIS JABATAN	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	1	SEKRETARIS DAERAH , ASSISTEN PEMERINTAHAN UMUM SETDA , BAGIAN ORGANISASI , KASUBAG KELEMBAGAAN DAN ANALISA JABATAN ✓
6	ANALIS KELEMBAGAAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	1	SEKRETARIS DAERAH , ASSISTEN PEMERINTAHAN UMUM SETDA , BAGIAN ORGANISASI , KASUBAG KELEMBAGAAN DAN ANALISA JABATAN ✓
7	ANALIS KELEMBAGAAN USAHA	S-1 EKONOMI / D-IV EKONOMI	1	1	SEKRETARIS DAERAH , ASSISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA , BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA , SUBAG USAHA DAERAH ✓
8	ANALIS KENELAYANAN	S-1 PERIKANAN	1	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS PERIKANAN , BIDANG PERIKANAN TANGKAP , SEKSI PEMBERDAYAAN NELAYAN ✓
9	ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	S-1 KEPENDUDUKAN	1	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL , BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN , SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ✓
10	ANALIS KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	S-1 PERIKANAN / D-IV PERIKANAN	1	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS PERIKANAN , BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA , SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN ✓
11	ANALIS KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI	5	1	SEKRETARIS DAERAH , BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH , SEKRETARIS BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH , SUBBAGIAN KEUANGAN , PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN ✓
				1	SEKRETARIS DAERAH , BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH , SEKRETARIS DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET , SUB BAGIAN KEUANGAN ✓
				1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , SEKRETARIS DINAS KESEHATAN , SUBAG KEUANGAN DAN PENGELOLAAN ASET ✓

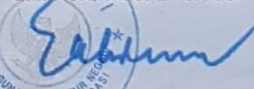
NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4		5
			1	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SUBAG KEUANGAN DINAS PENDIDIKAN ✓
			1	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS PERTANIAN , SEKRETARIS DINAS PERTANIAN , SUBAG KEUANGAN DINAS PERTANIAN ✓
12	ANALIS LAPORAN KEUANGAN	S-1 EKONOMI	1	1	SEKRETARIS DAERAH , BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH , BIDANG AKUNTANSI , SUB BIDANG PELAPORAN KEUANGAN DAERAH ✓
13	ANALIS MUTU HASIL PERIKANAN	D-IV PERIKANAN / S-1 PERIKANAN	1	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS PERIKANAN , BIDANG BISNIS HASIL OLAHAN DAN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN , SEKSI BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK PERIKANAN OLAHAN ✓
14	ANALIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	S-1/D-IV AKUNTANSI	1	1	SEKRETARIS DAERAH , BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH , BIDANG PERENCANAAN , PENGELOLAAN DATA DAN PENGENDALIAN , SUBBIDANG PERENCANAAN , EVALUASI DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH ✓
15	ANALIS PARIWISATA	S-1 MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA	1	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS PARIWISATA , BIDANG PEMASARAN , SEKSI INFORMASI DAN ANALISIS PARIWISATA ✓
16	ANALIS PEMBANGUNAN	S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	1	1	SEKRETARIS DAERAH , ASSISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA , BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA , SUBAG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN ✓
17	ANALIS PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH	D-IV PEMERINTAHAN / S-1 PEMERINTAHAN	1	1	SEKRETARIS DAERAH , ASSISTEN PEMERINTAHAN UMUM SETDA , BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA , KASUBAG UMUM PEMERINTAHAN SETDA ✓
18	ANALIS PENATAAN KAWASAN	S-1 PERENCANA WILAYAH DAN KOTA / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN , BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN , SEKSI PENCEGAHAN PENINGKATAN KUALITAS DAN PRASARANA SARANA UTILITAS (PSU) KAWASAN PERMUKIMAN ✓

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4		5
19	ANALIS PENDAPATAN DAERAH	S-1 EKONOMI / D-IV EKONOMI	1	1	SEKRETARIS DAERAH , BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH , BIDANG ANGGARAN , SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN ✓
20	ANALIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN	S-1 PERIKANAN / D-IV PERIKANAN	1	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS PERIKANAN , BIDANG BISNIS HASIL OLAHAN DAN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN , SEKSI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN BISNIS OLAHAN PERIKANAN ✓
21	ANALIS PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH	S-1/D-IV MANAJEMEN	1	1	SEKRETARIS DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA , BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA , SUBAG PENGEMBANGAN POTENSI DAN PRODUKSI SETDA ✓
22	ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR	S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	1	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN ✓
23	ANALIS PERUMAHAN	S-1/D-IV TEKNIK SIPIL / S-1/D-IV TEKNIK ARSITEKTUR	1	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN , BIDANG PERUMAHAN , SEKSI MONITORING DAN EVALUASI PERUMAHAN ✓
24	ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL	S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIOLOGI	1	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS SOSIAL , BIDANG PENANGANAN KEMISKINAN , SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERDESAAN ✓
25	ANALIS PROTOKOL	S-1 KOMUNIKASI	1	1	SEKRETARIS DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA , BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL , SUBAG PROTOKOL SETDA ✓
26	ANALIS REHABILITASI MASALAH SOSIAL	D-IV PSIKOLOGI / S-1 PSIKOLOGI	1	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS SOSIAL , BIDANG REHABILITASI SOSIAL , SEKSI REHABILITASI TUNA SOSIAL , PENYALAHGUNAAN NAPZA, KORBAN PERDAGANGAN DAN TINDAK KEKERASAN ✓
27	ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN	S-1 MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA / S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA	1	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, SANDI DAN STATISTIK , BIDANG TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , SEKSI INFORMATIKA ✓

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4		5
28	ANALIS STATISTIK	S-1 STATISTIK	2	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, SANDI DAN STATISTIK , BIDANG STATISTIK , SEKSI PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA ✓
				1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, SANDI DAN STATISTIK , BIDANG STATISTIK , SEKSI PENGELOLAAN SISTEM DATA ✓
29	ANALIS SUMBER DAYA AIR	S-1/D-IV TEKNIK SIPIL	1	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG SUMBER DAYA AIR , SEKSI REHABILITASI PENINGKATAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR ✓
30	ANALIS TAMAN	D-IV ARSITEKTUR / S-1 ARSITEKTUR	1	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN PERTAMANAN , SEKSI PERTAMANAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU ✓
31	PEMERIKSA JALAN DAN JEMBATAN	S-1/D-IV TEKNIK SIPIL	1	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG BINA MARGA , SEKSI PEMBANGUNAN PEMELIHARAAN JEMBATAN ✓
32	PENATA LAPORAN KEUANGAN	S-1/D-IV AKUNTANSI	1	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SUBAG KEUANGAN DINAS PENDIDIKAN ✓
33	PENATA PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	S-1/D-IV TEKNIK LINGKUNGAN	1	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN , BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN , SEKSI PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN PERMUKIMAN ✓
34	PENELAHAH DATA SUMBER BENIH	D-IV PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	1	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS PERTANIAN , BIDANG TANAMAN PANGAN , SEKSI PERBENIHAN PERLINDUNGAN TANAMAN DAN PENGOLAHAN PEMASARAN HASIL TANAMAN PANGAN (PPHP-TP) ✓
35	PENGAWAS JALAN DAN JEMBATAN	S-1/D-IV TEKNIK SIPIL	1	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG BINA MARGA , SEKSI PEMELIHARAAN JALAN KABUPATEN ✓

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4		5
36	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN	1	1	SEKRETARIS DAERAH , BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH , BIDANG BARANG MILIK DAERAH , SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH ✓
37	PENGELOLA BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN	D-III PERTANIAN / D-III PERKEBUNAN	1	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS PERTANIAN , BIDANG TANAMAN PANGAN , SEKSI PRODUKSI ANEKA TANAMAN KACANG DAN UMBI ✓
38	PENGELOLA KEFARMASIAN	D-III FARMASI	1	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , BIDANG PELAYANAN KESEHATAN , SEKSI KEFARMASIAN ✓
39	PENGELOLA KEUANGAN	D-III AKUNTANSI	1	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG PENATAAN BANGUNAN , SEKSI PEMBINAAN DAN JASA KONTRUKSI ✓
40	PENGELOLA PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT , SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR ✓
41	PENGELOLA PROGRAM GIZI	D-III KESEHATAN GIZI	1	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT , SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT ✓
42	PENGELOLA RUJUKAN KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , BIDANG PELAYANAN KESEHATAN , SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN ✓
43	PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN	D-III SISTEM INFORMASI / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA	1	1	SEKRETARIS DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT , BIDANG DATA INFORMASI DAN PEMBINAAN APARATUR , SUB BIDANG DATA INFORMASI DAN KEPEGAWAIAN ✓
44	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	S-1/D-IV TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN	1	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN , SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN ✓

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4		5
45	PENYUSUN BAHAN BANTUAN HUKUM	S-1 HUKUM	1	1	SEKRETARIS DAERAH , ASSISTEN PEMERINTAHAN UMUM SETDA , BAGIAN HUKUM SETDA , KASUBAG BANTUAN HUKUM SETDA ✓
46	PENYUSUN BAHAN DATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	S-1 KEPENDUDUKAN / S-1 PSIKOLOGI / D-IV KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / D-IV PSIKOLOGI	1	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL , BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN , SEKSI PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN ✓
47	PENYUSUN RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	1	SEKRETARIS DAERAH , ASSISTEN PEMERINTAHAN UMUM SETDA , BAGIAN HUKUM SETDA , KASUBAG PERUNDANG - UNDANGAN SETDA ✓
48	TEKNISI PEMETAAN DAN PENGGAMBARAN	D-III TEKNIK SIPIL	2	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG BINA MARGA , SEKSI PEMELIHARAAN JALAN KABUPATEN ✓
				1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN , BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN , SEKSI PENCEGAHAN PENINGKATAN KUALITAS DAN PRASARANA SARANA UTILITAS (PSU) KAWASAN PERMUKIMAN ✓

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi**

Syafruddin